

Jokowi Dengar Keluhan Nelayan Cantrang di Istana

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Rabu, 17/01/2018 16:22 WIB



Presiden Joko Widodo bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti menerima perwakilan nelayan yang mengeluhkan kebijakan larangan cantrang. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menerima perwakilan nelayan di ruang kerjanya dalam Istana Merdeka sekitar pukul 15.40 WIB. Bupati Tegal Enthus Susmono serta Plt Wali Kota Tegal Jawa Tengah Nursoleh turut menghadiri pertemuan itu.

Berdasarkan pantauan, Jokowi didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Sebelum cantrang dilarang, kami sejahtera," ujar seorang perwakilan kepada Jokowi, Rabu (17/1).

Lihat juga:

[DPR Harap Menteri Susi Buat Aturan Cantrang Bukan Melarang](#)

Jokowi memperhatikan serta mencatat setiap hal yang disampaikan kepadanya. Susi dan Pratikno juga terlihat menulis catatan saat mendengar keluhan nelayan.

Pertemuan ini memang diinisiasikan Jokowi pasca bertemu 16 perwakilan nelayan Jawa Tengah yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang di Tegal, Senin (15/1) siang.

Cantrang menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai hingga kini sejak Susi melarang penggunaan cantrang melalui Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets.

Lihat juga:

[Ribuan Nelayan Demo Istana Minta Legalisasi Cantrang](#)

Cantrang dianggap hanya menguntungkan saudagar kapal besar dan merusak populasi ikan, sumber penghidupan nelayan kecil.

Saat ini, di depan Istana Merdeka sekitar 12 ribu nelayan berdemo meminta cantrang boleh kembali digunakan. Mereka menyatakan, cantrang tidak merusak seperti yang diklaim Susi. (gil)

DPR Harap Menteri Susi Buat Aturan Cantrang Bukan Melarang

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Rabu, 17/01/2018 15:58 WIB



Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku, pengaturan terkait cantrang bisa dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian komprehensif dengan nelayan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono^o)

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar alat tangkap cantrang tidak dilarang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyebut, Pemerintah sebaiknya tak melarang penggunaan cantrang, tetapi melakukan pengaturan terkait penggunaan alat tangkap itu.

"Yang diperlukan bukan larangan, tapi pengaturan," kata Daniel di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (17/1).

Pengaturan penggunaan cantrang yang dimaksud Daniel itu, meliputi aturan terkait zona kedalaman melaut, besar jaring, hingga pengaturan wilayah penangkapan.

Sehingga kata dia, terkait cantrang ada payung hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kebingungan baik bagi nelayan maupun aparat penegak hukum.

"Jadi ada payung hukumnya, nelayan ini sudah banyak yang rugi dipenjara karena kesalahan yang tidak jelas. Karena larangan cantrang ini kan belum jelas juga," kata Daniel.

Lihat juga:

[Nelayan akan Temui Jokowi Bahas Kesepakatan Cantrang](#)

Lebih lanjut kata Daniel, pengaturan terkait cantrang ini pun bisa dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian yang komprehensif antara kedua belah pihak. Baik dari sisi nelayan maupun pemerintah.

Nelayan diketahui sejak tahun lalu telah melakukan studi akademik terkait penggunaan cantrang. Kajian itu pun telah diserahkan ke pihak Istana Presiden, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

"Karena yang lama tidak ada tindak lanjut, mungkin dianggap berat sebelah. Kalau begitu buatlah kajian bersama, antara pemerintah dan nelayan kerja bareng bikin kajian ini," kata dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diketahui telah mengeluarkan kebijakan terkait larangan cantrang dan trawl sejak 2015 lalu melalui Peraturan Menteri nomor 2 Tahun 2015.

Permen itu kemudian diubah ke dalam Permen nomor 71 tahun 2016 setelah Permen awal dicabut atas rekomendasi dari pihak ombudsman karena kebijakan larangan cantrang Menteri Susi dinilai tanpa transisi.

Permen 71 tahun 2016 pun pada 2017 lalu sempat di moratorium hingga 31 Desember 2017, selama itu cantrang masih diperbolehkan beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Lihat juga:

[Ribuan Nelayan Demo Istana Minta Legalisasi Cantrang](#)

(djm)